

BAB IV

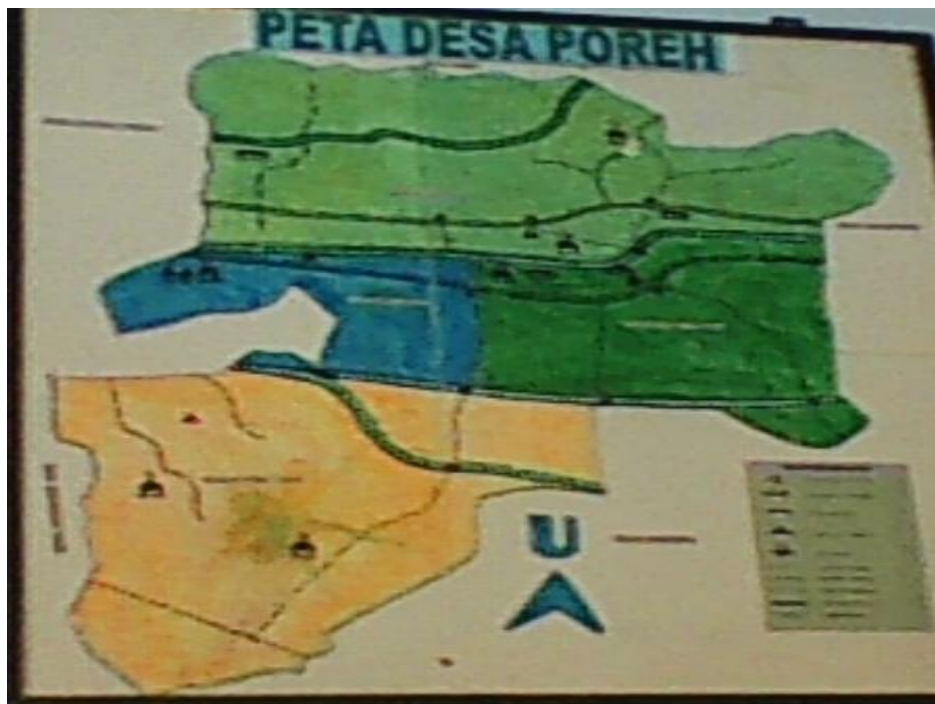
LAPORAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam bagian ini, berisi tentang kondisi kependudukan Desa Poreh, kondisi sosial ekonomi Desa Poreh, kondisi keagamaan Desa Poreh, kondisi pendidikan Desa Poreh, kondisi sosialisasi politik Desa Poreh, kondisi budaya Desa Poreh dan kondisi budaya politik Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

1. Kondisi geografis Desa Poreh

Berdasarkan paparan monografi Desa Poreh tahun 2013 luas dan batas Desa Poreh adalah 275 Ha.



Batas wilayah Desa Poreh adalah sebagai berikut :

- a. Batas utara : Jambu
- b. Batas selatan : Tarogan
- c. Batas barat : Banaresep Timur
- d. Batas timur : Cangkrenng

Jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari pemerintahan Kecamatan adalah : 3 Km.
- b. Jarak dari pemerintahan Kabupaten/Kota adalah : 13 Km.

2. Kondisi kependudukan Desa Poreh

TABEL I

Jumlah penduduk Desa Poreh

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	1594
2	Perempuan	1752
		3346

Sumber: monograafi Desa Poreh tahun 2013

Dengan demikian jumlah penduduk Desa Poreh antara perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuannya.

3. Kondisi sosial ekonomi Desa Poreh

Sosial ekonomi merupakan keberlangsungan masyarakat yang mendapatkan penghasilan ataupun pengeluaran, keuntungan ataupun kerugian yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Poreh, sehingga kondisi sosial ekonomi dapat dilihat melalui mata pencahariannya yakni sebagai berikut :

TABEL II

Mata pencaharian masyarakat Desa Poreh

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Karyawan	150 Orang
2	Wiraswasta	50 Orang
3	Tani	1.200 Orang
4	Pertukangan	73 Orang
5	Buruh Tani	275 Orang
6	Pensiun	17 Orang
7	Pemulung	7 Orang

Sumber : monografi Desa Poreh tahun 2013

Dengan demikian, profesi terbanyak di Desa Poreh adalah petani, yakni berkisar 1.200 orang. Sedangkan profesi yang lainnya 500 orang ke-bawah. Sedangkan kelompok tenaga kerja masyarakat Desa Poreh berdasarkan usianya adalah sebagai berikut :

TABEL III

Kelompok tenaga kerja masyarakat Desa Poreh berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah orang
1	10-14 Tahun	02 Orang
2	15-19 Tahun	17 Orang
3	20-26 Tahun	153 Orang
4	27-40 Tahun	916 Orang
5	41-56 Tahun	600 Orang
6	57-Keatas	402 Orang

Sumber: Monografi Desa Poreh 2013

Sesuai dengan tabel diatas menjelaskan bahwasanya paling banyak yang bekerja sesuai dengan usia adalah berusia 27-40 tahun. Sedangkan yang kedua berusia 41-56 tahun, yang ketiga berusia 57-keatas, yang keempat 20-26 tahun, yang kelima adalah berusia 15-19 tahun dan yang keenam adalah berusia 10-14 tahun.

4. Kondisi keagamaan Desa Poreh

Masyarakat Poreh merupakan masyarakat yang agamis dalam arti kental terhadap doktrin agama Islam, dapat dibuktikan dengan adanya pengajian setiap malam jum'at, tahlilan dan istigasah. Benteng dari agama Islam Desa Poreh mempunyai tiga pondok pesantren yakni pesantren Al-Hasyimi yang di asuh oleh KH Imam Mawardi, pondok pesantren

Miftahul-Hidayah yang di asuh oleh KH Montaha Ridwan, pondok pesantren Ar-Rhasyidin yang di asuh oleh KH Rhasyid. bahkan seluruh orang Poreh beragama Islam dan beraliran organisasi masyarakat nahdlatul ‘ulama’ (NU).

Persamaan aliran masyarakat Desa Poreh memudahkan kalangan kiai/tokoh masyarakat untuk menyatukan tekad dan bulat untuk mempertahankan tradisi masyarakat yang pro Islam yang benar menurut keyakinannya, dalam bingkai dakwah mengajak, menyuruh masyarakat terhadap keabikan dan mencegah dari segala macam kemungkaran, sehingga tidak ada satupun masyarakat Poreh yang tidak melaksanakan shalat jum’at.

5. Kondisi pendidikan Desa Poreh

Pendidikan merupakan salah satu persyaratan utama dalam memajukan negara Indonesia, tanpa pendidikan negara Indonesia akan mengalami keterbelakangan (primitif), karena dalam pendidikan manusia bukan hanya tahu benar dan salah, namun manusia juga akan tahu untuk mengelola SDA yang melimpah di dunia khususnya di negara Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu dibidik adalah manusia, sebagai pengelola bagi SDA disekitarnya.

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Poreh dapat dikatakan sudah lumayan maju, terbukti dengan banyaknya masyarakat di Desa Poreh yang sekolah bahkan diluar Desa Poreh, bahkan di luar Sumenep

dan bahkan di luar Madura, diluar Jawa bahkan yang sampai Kuliah di luar Negeri. Dapat dibuktikan juga dengan banyaknya masyarakat Desa Poreh yang sudah lulusan SMA, S1, S2 bahkan ada yang sudah S3. Untuk lebih detailnya berikut ini akan penulis uraikan terkait lembaga pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL IV

Jumlah lembaga pendidikan di Desa Poreh

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3
2	Madrasah (MD)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
5	Sekolah Menengah Pendidikan (SMP)	1
6	Madrasah Aliyah (MA)	1
7	Pondok Pesantren (Ponpes)	2

Sumber: aparat Desa Poreh.

6. Kondisi sosialisasi politik di Desa Poreh

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya kondisi sosialisasi politik Desa Poreh kurang tinggi akan kandidat, karena sosialisasi politik di Desa Poeh masih menitikberatkan terhadap usia, usia muda lebih berorientasi

tinggi akan sosialisasi politik, karena banyak dari kalangan pemuda yang sudah mengenyam pendidikan baik SMA, S1, S2, bahkan sampai S3. Sedangkan usia masyarakat Desa Poreh yang sudah tua masih cenderung orientasinya kurang tinggi atau bisa dikatakan rendah. Sebelum kita mengarah lebih jauh alangkah lebih baiknya kita mengetahui konsepsi dari pada sosialisasi politik secara general.

Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seorang individu mengenali sistem politik, yang kemudian ditentukan oleh sifat persepsinya-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik.⁴³ Yakni merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

David Eston dan Jack Dannis mendefinisikan sosialisasi politik sebagai suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.⁴⁴ Dengan demikian, sosialisasi politik dalam masyarakat, dapat dipolakan sebagai berikut :

a. Sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter

Berdasarkan definisinya, negara totaliter itu berusaha untuk mengontrol semua aspek dari masyarakat, dan seperti yg diperlihatkan

⁴³ Basrawi, *Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 81

⁴⁴ Ibid, hal 82

oleh pidato-pidato Lenin dan Hitler, tekanan besar tidak boleh tidak diletakkan pada proses sosialisasi pada umumnya dan sosialisasi pada khususnya. Maka masyarakat totaliter itu berada dengan masyarakat demokrasi modern dalam tingkat pengontrolan yg dilaksanakan terhadap sosialisasi politik para anggota-anggotanya.⁴⁵

Secara langsung atau tidak langsung, semua pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan para anggota masyarakatnya sampai derajat-derajat yg berbeda, dengan jalan mengontrol informasinya ; akan tetapi dalam masyarakat totaliter pengontrolan tersebut meliputi segala-galanya.

b. Sosialisasi politik dalam masyarakat primitif

Dalam masyarakat primitif peranan sosialisasi pada umumnya tampak paling jelas, khususnya dalam masyarakat yg tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi kemasyarakatan yg kuat, yg menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan dalam sosialisasinya, masyarakat sedemikian itu tidak mengenal diferensiasi seperti yg terdapat dalam masyarakat modern yg kompleks, dan proses sosialisasinya dicirikan dengan kesatuan intrinsik yg menekankan masalah ritual, legitimasi peranan sosial, dan sering pula pencapaian status.

⁴⁵Michael Rush, Philip Alhoffs, Alih bahasa Kartini Kartono-Ed.1,-13-(Jakarta:Rajawali Pers, 2008), 55.

Seperti rakyat Buganda dari Afrika Timur yg hidup di tengah sistem monarki yg terpusat (dengan sentralisasi tinggi pada suatu hierarki yg tidak didasarkan pada kelas-kelas atau kelompok-kelompok, akan tetapi pada status individu. Hal ini memungkinkan banyak mobilitas didalam hierarki, akan tetapi tidak menghalangi teman pokok dari sosialisasi karna menghormati orang tua dan rasa hormat kepada atasan-atasan ; merupakan tema penting sekali dalam mempertahankan sistem hierarki.⁴⁶

c. Sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang

Hubungan antara hal-hal yg lama dengan hal yg baru, paling jelas dapat dilihat dari bagian-bagian dunia yg dahulunya di jadikan koloni oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Sampai kadar yg berbeda kekuatan-kekuatan kolonial tersebut memperkenalkan lembaga-lembaga politik barat, birokrasi, kebudayaan, dan pendidikan. Pada bagian besar kasus, manifestasi yg bermacam-macam dari masyarakat barat tetap ada, jika utuh, sedikit-dikitnya masih ada, tetap saja membentuk wahana-wahana modernisasi dalam masyarakat-masyarakat sedemikian itu. Sementara itu terdapat persamaan penting dalam sosialisasi antara negara-negara berkembang dan negara-negara demokrasi modern.

⁴⁶ Ibid, hal 75.

David Apter mengihtisarkan secara efektif masalah sosialisasi politik di masyarakat- masyarakat berkembang, ketika dia mengemukakan bahwa ideologi dari banyak bangsa baru mengambil bentuk dari suatu agama : tidak dalam pengertian spiritual khusus, akan tetapi dalam pengertian bahwa mereka itu dalam prakteknya bersifat teokratis. Contoh dapat dilihat juga di negara Ghana yg mengakhiri rezim Kwame Nkrumah tahun 1966 dalam satu periode pemerintahan militer.⁴⁷

d. Sosialisasi politik dan perubahan

Sifat sosial politik yg bervariasi menurut waktu serta yg selalu menyesuaikan dengan lingkungan yg memberikan kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta sifat dari perubahan : Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Kebalikannya, semakin besar derajat perubahan di dalam satu pemerintahan non-totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan politik, semakin kecil juga agensi-agensi utama dari sosialisasi politik itu.⁴⁸

Semakin homogen suatu masyarakat dan semakin lama ia bertahan menurut waktu, semakin memungkinkan proses sosialisasinya menjadi didefinisikan secara jelas dan realitif

⁴⁷Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Cet ke-14 PT RajaGrafindo Persada 2013) 93.

⁴⁸A Syahrial Rahman, MA, Dkk, *Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia*, (Jakarta: 2000), 35.

dipersatukan, tampaknya berlangsung dampak yg sama dalam masyarakat-masyarakat yg berusaha terang-terangan untuk mengontrol proses sosialisasinya.

Sistem politik dalam suatu masyarakat totaliter dapat menikmati legitimasi yg meluas sebagai hasil sosialisasi politik, sedangkan sistem politik dari suatu masyarakat non-totaliter justru meniadakan legitimasi tersebut. Karena penting di pahami legitimasi dapat meluas sampai pada banyak aspek dari sistem politik, atau justru dapat dibatasi pada beberapa hal. Umumnya terdapat bukti bahwa kebanyakan orang Amerika menerima lembaga politik mereka yg utama.

Dari beberapa identifikasi sosialisasi politik di Desa Poreh berorientasi pada masyarakat primitif, dalam arti peranan sumber inspirasi politik diperoleh kebanyakan melalui ritualitas keagamaan, tidak jarang dalam memenangkan kandidat masyarakat masih percaya terhadap dukun, tokoh masyarakat sebagai konstruksi pemahamannya. Sedangkan tolak ukur kemajuan sekaligus kepandaian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan partisipan menekankan terhadap kalangan pemuda sebagai generasi kalangan orang yang sudah tua, karena secara kuantitas masih lebih banyak orang tua. Menurut kepala Desa Poreh kendala untuk mencapai masyarakat yang berorientasi tinggi terhadap politik adalah kalangan orang tua, karena kebanyakan kurang mengenyam pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh

kepala Desa Poreh ketika ditanya tentang sosialisasi politik di Desa Poreh adalah sebagai berikut :

“untuk mencapai terhadap masyarakat yang berorientasi tinggi terhadap politik, minimal 20 tahun dek, sedangkan saya masih menjabat kepala Desa berjalan dua periode, karena masyarakat masih kurang paham terkait dunia perpolitikan alasannya masyarakat masih kurang tinggi pendidikannya, oleh karena itu, harapan untuk mencerdaskan masyarakat Poreh adalah kalangan pemuda yang harus senantiasa mengayomi terhadap masyarakat awam, jelas kalangan pemuda lebih berorientasi tinggi dari pada kalangan tua, karena kalangan pemuda lebih tinggi dari segi pendidikannya”.⁴⁹

Dengan demikian, kondisi sosialisasi politik masyarakat Poreh dapat diidentifikasi secara mayoritas lebih cenderung masyarakat primitif yang perlu pendidikan secara memadai, sehingga harapan yang disampaikan oleh kepala Desa adalah kalangan pemuda sebagai generasi dari kalangan orang tua.

7. Kondisi budaya di Desa Poreh

Budaya merupakan segala produktifitas manusia, berupa karya menghasilkan teknologi baik itu kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam dan hasilnya dapat juga dipertanggung jawabkan, karsa merupakan kehendak jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk mengejewantahkan keinginan hatinya, rasa merupakan keadaan jiwa yang ingin mengaktualisasikan norma-norma dalam masyarakat diranah yang lebih luas. Yang berisi

⁴⁹Haji Parki Praseno, kepala Desa Poreh. Wawancara langsung pada 26 Desember 2014, pukul 15:00 WIB.

kesenian, ideologi, dan cipta merupakan keadaan mental dan fisik dalam mengoptimalkan kehendak individu atau kelompok dari bahan mentah ke bahan jadi.⁵⁰

Produktifitas masyarakat berisi nilai-nilai bertujuan untuk mengatur dan mengelola lingkungannya agar sistematis dan kredibel. Upaya untuk mengantisipasi adanya kekuatan buruk endingnya dapat menjadikan bentrok, kontra, konflik dan melahirkan desintegrasi baik dari dalam maupun dari luar masyarakat, sehingga memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan dan diucapkan. Jadi, kebudayaan sendiri memberikan sumbangsih terhadap regulasi di masyarakat, upaya untuk memberikan pemahaman bagaimana harus melakukan, bertindak, menentukan sikapnya terhadap orang disekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya kondisi budaya di Desa Poreh ada beberapa hal yakni, hadrah, gambus, istigawasah, tahlilan, kumpulan syarwah, tadarrusan, manakiban dan pembuat tikar sebagaimana dikatakan oleh kepala Desa ketika ditanya tentang kondisi budaya di Desa Poreh.

“untuk budaya di Desa Poreh dek, ada beberapa budaya seperti hadrah, gambus, istigasah, tahlilan kumpulan syarwa, kumpulan darusan dan pengrajin tikar. Hadrah, masyarakat poreh yang ikut bershalawat kepada nabi muhammad saw, diiringi dengan musik tradisional seperti gendang, ketipung dan jidur untuk pelaksanaannya biasanya setiap minggu yakni pada malam minggu, bertujuan untuk memohon syafaat kepada Nabi

⁵⁰ Tri Purwanto, Bambang. *Kewarganegaraan 2*. (Jakarta: Platinum, 2010) 25.

Muhammad sekaligus bersilaturrehmi sesama masyarakat Poreh. Sedangkan gambus, biasanya dilaksanakan pada saat walimah (perayaan) baik itu pada saat acara pernikahan, tasyakuran dan acara hajatan yang bertujuan untuk menghibur masyarakat Poreh sekaligus mengenang sya'ir-sya'ir yang indah dari kalangan sesepuh. Sedangkan istigasah, dilaksanakan setiap satu minggu sekali biasanya pada malam jum'at kadang malam selasa, bertujuan untuk mengharap ampunan, pertolongan dari Allah sekaligus bersilaturrehmi sesama masyarakat Poreh. Kumpulan syarwa merupakan perkumpulan ngaji yasin bersama, diiringi dengan pembacaan tahlil sekaligus penceramah memberikan mau'idzatuhasanah yang bertujuan untuk selalu mengingat dan mengamalkan ajaran islam sekaligus membuka hati yang sudah tertutupi oleh dosa atau kemaksiatan. Pelaksanaannya juga sama yakni setiap satu minggu satu kali dengan bergiliran yang menjadi tuan rumah. Sedangkan tahlilan biasanya mendo'akan bagi orang yang sudah meninggal sekaligus mengharap kemudahan dalam menghadapi hidup dan mati. Pelaksanaan biasanya kalau sudah ada shahibulmusibah (kerabat yang ditinggal dunia oleh seseorang). Kadang juga dilaksanakan pada setiap malam jum'at. Sedangkan kumpulan darusan merupakan kumpulan yang bertadarrus mengaji Al-Qur'an dengan tujuan untuk memperlancar sekaligus mentartilkan pembacaan Al-Qur'an sehingga makharijul-hurufnya tepat dan benar, juga bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT".⁵¹

Seperti itulah budaya masyarakat Desa Poreh, lebih mengarah terhadap budaya keagamaan, walaupun demikian masyarakat Desa Poreh, Dusun Poreh Laok merupakan salah satu Dusun memproduksi tikar daun siwalan bahkan Dusun tersebut terkenal dengan Dusun tikar siwalan⁵² karena 90% masyarakatnya adalah memproduksi tikar daun siwalan atau

⁵¹Haji Parki Praseno, kepala Desa Poreh, wawancara langsung pada 26 Desember 2014, pukul 14:20 WIB.

⁵² MADURACORNER.com Desa Poreh, Dikenal Sebutan Dusun Tikar Siwalan Juli 2014 diakses Pada 13 Desember 2014 pukul 02:30 WIB.

tikar rakara. Untuk membuat tikar rakara warga cukup mengambil disebelah rumah saja, karena memang setiap rumah sudah berdiri dan tumbuh pohon siwalan yang siap melayani para kaum ibu. Untuk menjadikan sebuah tikar yang siap pakai atau siap jual memang tidak terlalu sulit atau tidak akan memakan waktu lama, artinya sangat mudah dan gampang lebih bagi mereka yang sudah terampil.

8. Kondisi budaya politik di Desa Poreh

Budaya politik di Desa Poreh cenderung masuk terhadap budaya politik kaula dapat dibuktikan dengan adanya problem di tengah masyarakat, masyarakat mempercayai sepenuhnya terhadap kalangan tokoh masyarakat dan kalangan yang berwenang yakni pemerintah, sehingga masyarakat cenderung taat dan patuh terhadapnya. Seperti adanya konflik tauran antara dusun poreh tengah dengan dusun poreh dajah, problem politik uang, persoalan keagamaan dll, prinsipnya asalkan masyarakat tidak dirugikan.

Pengertian budaya sudah dijelaskan diatas, untuk pengertian politik sekaligus akumulasi dari pada pengertian budaya politik adalah sebagai berikut. Pengertian politik dalam hal ini, Beddy Iriawan Maksudi memberikan lima hal terkait pengertian dari pada politik, *pertama*, state (negara), *kedua*, power (kekuasaan), *ketiga*, decision making (pengambilan

keputusan), *keempat*, policy (kebijakan), *kelima*, distribution (pembagian), atau allocation (alokasi).⁵³

Disebut negara, karena mempelajari tentang suatu negara, entah itu berkenaan dengan sistem, lembaga dan strukturnya, sehingga dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait negara. Di katakan kekuasaan, politik ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan kekuasaan, pada prinsipnya kekuasaan merupakan usaha pihak satu didalam mempengaruhi pihak yang lainnya sehingga sesuai dengan keinginan pihak yang satu tadi. Disebut pengambilan keputusan karena keputusan yang diambil mengikat terhadap masyarakat, sehingga fondasi politik merupakan pengambilan keputusan..

Disebut kebijakan publik, karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat mengekang merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat sehingga menjadi sebuah wewenang bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan secara sergap cepat dan tegas. Disebut pembagian, karena distribusinya bersifat materill ataupun immateril yang bertujuan untuk mensejahterakan bersama, jika pembagiannya tidak merata biasanya sering terjadi konflik.

Budaya politik lahir karena adanya pemerhati dari kalangan tokoh seperti Gabriel A Almond dan Sydne Verba dalam melakukan penelitian yang dituangkan dalam buku berjudul budaya politik, dalam kehidupan

⁵³Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.

manusia, ternyata manusia mempunyai wewenang yang cukup signifikan dalam sistem politik, karena manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya, untuk mewujudkan kepentingannya. Dalam hal ini Maslow mensistematiskan kebutuhan manusia diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, kebutuhan dasar atau fisiologis. *Kedua*, kebutuhan rasa aman. *Ketiga*, kebutuhan sosial. *Keempat*, kebutuhan akan penghargaan. *Kelima*, mempertinggi kapasitas kerja.⁵⁴

Kebutuhan hidup manusia ternyata tidak berhenti terhadap kebutuhan dasar ataupun kebutuhan fisiologis, melainkan manusia juga membutuhkan rasa aman dan berinteraksi dengan orang lainnya. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia, ternyata juga membutuhkan penghargaan terhadap terhadap orang lain. Begitupun seterusnya, manusia akan haus kebutuhan bilamana mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.⁵⁵

Dalam kehidupan kesehariannya, manusia hidup tidak bisa terlepas dari pada politik, baik itu secara langsung, manusia cukup andil dalam berpartisipasi dalam peristiwa praktik politik ataupun tidak langsung dalam praktik politik, manusia hanya mendengarkan informasi terkait praktik politik. Dengan demikian warga negara dengan pemerintahan sering berinteraksi dalam dunia politik, sehingga memberikan perbedaan

⁵⁴ Ibid. Hal 6.

⁵⁵ Ibid, hal 55.

pendapat, perbedaan sikap diantara pemerintah dengan rakyat sering melakukan controlling yang berujung terhadap idealitas masing-masing.

Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam budaya politik seperti Gabriel A Almond dan Sydne Verba mengakui adanya dialektika antara proses politik dengan nilai budaya dimasyarakat. Budaya politik merupakan identitas masyarakat, karena ada masyarakat maka pasti ada budaya, namun tidak ada budaya tanpa masyarakat, yang termasuk dalam budaya politik diantaranya adalah : legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, partisipasi masyarakat dan yang lainnya, dengan demikian budaya politik mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan kebijakan pemerintahan yang mengikat terhadap masyarakat.

Mengenai alasan kenapa budaya politik urgen untuk dipelajari, menurut Dennis Kavangh ada dua alasan yang cukup signifikan yakni : *pertama*, adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintahan, yang menginginkan dukungan dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan kelompok penekan dan tokoh masyarakat, pendekatan budaya politik cukup signifikan untuk mengetahui perbedaan peranan tingkah laku dan produktivitas sistem politik yang bersangkutan. *Kedua*, dengan memahami antara budaya politik dan sistemnya, maka akan

semakin cepat masyarakat akan memperoleh perubahan yang cukup signifikan.⁵⁶

Dengan demikian budaya politik merupakan tingkah laku dan orientasi terhadap politik yang dimengerti oleh anggota sistem politik, baik itu masyarakat yang hidup pada masa tradisional maupun yang hidup pada masa transisional, dapat juga diartikan pola persepsi individu yang di ekspresikan terhadap politik yang nantinya akan mempengaruhi terhadap produktifitas struktur. Dapat dipahami antara budaya politik dan struktur politik tidak bisa dibahas secara terpisah karena struktur yang menghasilkan sistem politik merupakan interrelasi antara manusia beberapa manusia yang membahas masalah kekuasaan, regulasi dan wewenang.

Jadi, budaya politik merupakan sesuatu yang bernilai melandasi pandangan hidup yang menentukan terhadap orientasi yang berbeda, sedangkan bentuk dari pada budaya politik adalah perilaku dan norma, normapun berasal dari nilai yang membentuk perilaku manusia baik itu menjadi baik ataupun tidak terkait politik, sehingga subjek dari pada pendekatan budaya politik adalah individu, nantinya akan memberikan persepsi dari per seorangan dengan orang lain setelah itu dibentuk menjadi kesimpulan dalam sebuah penelitian yang bersifat empirik, berbeda dengan penelitian filsafat yang lebih menekankan terhadap abstrak.

⁵⁶Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2004), 35.

Beddy Iriawan Maksudi juga menyebutkan bahwasanya Gabriel dan Verba memberikan tiga orientasi terkait budaya politik yang dipengaruhi oleh parsons, ketiga orientasi tersebut adalah sebagai berikut : yakni.

Pertama, orientasi kognitif, merupakan sebuah pengetahuan terkait kepercayaan terhadap politik, warga negara mampu mengetahui hak-haknya yang tercantum dalam konstitusi, entah itu pemilu, partai politik dan aktivitasnya begitupula terhadap sistem yang mampu mengetahui peran-perannya baik itu *input, proses dan output*, sehingga warga negara mengetahui kinerja pemimpinnya melalui media massa, otomatis rakyat akan melakukan controlling terhadap pemerintahannya.⁵⁷

Tujuan dari pada orientasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas kecerdasan, keterampilan, serta kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya selaku warga negara, juga mampu berpartisipasi dengan baik dalam memilih dan memilah para kandidatnya dan mampu menyampaikan aspirasi terhadap pemimpinnya, tetapi kenyataannya di Indonesia masih kurang pendidikan politik, masyarakat masih tidak bisa berpartisipasi secara aktif dan kredibel, oleh karena itu program yang cukup signifikan untuk memberikan kontribusi yang efektif, tidak lain bahkan harus mengaktualisasikan peningkatan pendidikan politik.

⁵⁷ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*. Hal 65.

Kedua, orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap lembaga politik, baik itu supra struktur (lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif) dan infra struktur (ormas, kelompok kepentingan, kelompok intelektual/penekan, pers, lembaga swadaya masyarakat dll), sangat berbeda dengan orientasi kognitif, orientasi afektif menekankan terhadap perasaan (emosi), baik itu diuntungkan, diperhatikan, dicurangkan, disejahterkan, dan sejenisnya. Orientasi ini lebih berpengaruh dari pada orientasi kognitif, karena orientasi ini menekankan terhadap perasaan, maka tidak jarang ketika pada saat pemilu, kandidat mendekati para konstituennya melalui popularitasnya yang memainkan perasaan yang disukai ataupun tidak disukainya. Oleh karena itu, orientasi afektif lebih dijadikan sarana oleh kandidat dalam mewujudkan kepentingannya.⁵⁸

Ketiga, orientasi evaluatif : merupakan reaksi dari pada objek-objek politik yang secara memadai dari tipikal atau standarisasi kriteria terkait informasi dan perasaan terhadap politik, tampak saat pemilu, orientasi ini merupakan akumulasi dari pada orientasi kognitif dan orientasi afektif, misalnya pada saat pemilu, ketika individu mengetahui bahwa kandidat si A lebih baik dari pada si B, biasanya individu tersebut menyukainya dan memilihnya. Dengan demikian orientasi ini merupakan orientasi terakhir yang mengakumulasikan kedua orientasi sebelumnya (orientasi kognitif dan orientasi afektif).

⁵⁸A H.I Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007), 35.

Orientasi ini diharapkan agar mampu memberikan peluang yang besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan terhadap kandidat, melalui pemilih yang cerdas dan rasional, karena orientasi ini merupakan akomodasi dari pada orientasi sebelumnya. Oleh karena itu, partai politik, merupakan alternatif dalam mencerdaskan rakyat melalui fungsinya yakni sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik dan pengaturan ataupun manajemen konflik.

Berdasarkan budaya politik yang berbeda, juga memberikan efek orientasi yang berbeda sehingga dalam hal ini, memberikan sumbangsih perbedaan didalam tipe budaya politik. Beddy Iriawan Maksudi menguraikan tipe budaya politik menurut Gabriel A Almon dan Sydne Verba yakni sebagai berikut :⁵⁹

1. Budaya politik parokial

Budaya politik parokial identik dengan tingkat pendidikan sangat rendah, sehingga menyebabkan tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Warga negara antipati terhadap sistem politik, bahkan tidak mau mengenal lebih jauh tentang negaranya, sehingga mereka jarang membicarakan budaya politik, dalam sebuah negara yang mendominasi orientasi afektif, maka akan memberikan penentuan terhadap budaya politik parokial, sehingga tingkat kesadarannya sangat minim dalam mengalokasikan hak pilihnya dan cenderung pesimis

⁵⁹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*. Hal 69.

dalam berbicara masalah perpolitikan. Dengan demikian sikap dan perilakunya cenderung militan dari pada toleran.

2. Budaya politik kaula

Budaya politik kaula identik dengan tingkat partisipasinya pasif, namun dari segi pembangunannya sudah cenderung relatif maju. Dalam tipe budaya politik ini warga negara tidak memperlihatkan keaktifan berpartisipasi, melainkan tipe budaya ini lebih bersifat menerima, pasrah dan patuh terhadap pemerintahan karena tidak ada jalan lain untuk memberikan kontribusi yang signifikan, kecuali dengan tunduk, patuh dan menerima terhadap kepastian yang sudah terjadi. Akan tetapi pengetahuan terhadap praktik politik hampir sama dengan tipe budaya politik partisipan, namun, perbedaannya keikutsertaan lebih pasif dari pada tipe budaya politik partisipan.

3. budaya politik partisipan

Budaya politik partisipan identik dengan tingkat partisipasinya sangat tinggi, sehingga menyebabkan kesadaran politiknya sangat tinggi. Dalam hal ini warga negara mengerti betul terkait hak dan kewajiban warga negaranya, juga memberikan pengaruh terhadap sistem politik. Warga negara mempunyai hak untuk berkompetisi untuk memberikan tuntutan, terhadap sistem politik, budaya politik partisipan. Warga negara bebas berdiskusi terkait politik, pada saat tertentu warga negara bisa mempengaruhi perpolitikan yang berjalan

dalam sistem demokrasi, tipe ini sangat memberikan tumbuh dan suburnya demokrasi, karena adanya harmonisasi antara pemerintah dan warga negara, karena salah satu dengan yang lainnya sama-sama berinteraksi untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dari ketiga tipe budaya politik tersebut, dapat dikatakan bahwasanya masyarakat Desa Poreh masuk terhadap budaya politik kaula, karena berdasarkan hasil penelitian dari segi pembangunan dapat dikatakan sudah mulai maju, dengan infrastruktur yang memadai seperti banyak jalan di Desa Poreh yang di paving, di aspal bahkan jembatan-jembatan di Desa Poreh banyak yang sudah di rehab biasanya dari kayu dan bambu, sekarang sudah dari beton, semen, bahkan ada jembatan gantungnya dari besi. Namun dalam persoalan apapun masyarakat cenderung apa kata kalangan tokoh masyarakat dan pemerintah, karena dua kubuh tersebut merupakan datang dan kembalinya masyarakat ketika mengalami persoalan.

B. Temuan Hasil Penelitian

Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya seseorang tidak akan dapat melakukan praktek apapun tanpa dilalui dengan pemahaman, kecuali orang yang ikut-ikutan. Maksudnya, tidak mempunyai kepribadian. Karena dalam pemahaman terkadang dapat mengkontruk praktek yang akan kita lakukan. Pemahaman dari orang lain juga dapat mengkonstruk pemahaman terhadap diri sendiri. Sehingga melatarbelakangi terhadap praktek yang akan kita

lakukan. Begitu pula pemahaman masyarakat akan politik uang, juga akan melatarbelakangi terhadap perilaku memilih masyarakat di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

1. Pemahaman masyarakat tentang politik uang pada pilkades tahun 2014 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Pemahaman masyarakat di Desa Poreh tentang politik uang akan dimulai dari tokoh masyarakat sekaligus pendamping/penasehat dari KPPS pilkades 2014.

“politik uang kalau menurut saya nak, bukan hanya terjadi pada saat pemilihan umum, melainkan terjadi pada saat penerimaan CPNS dan lain sebagainya. Walaupun kenyataannya sering terjadi pada saat pemilihan umum, seperti pilbup pilgub pileg bahkan pilpres. Walaupun demikian saya tidak setuju terkait praktek politik uang tersebut, karena kalau dalam pemilihan umum, nantinya tidak akan mencapai arti dari pada sistem pemilu yang berintegritas dalam arti tidak akan mencapai pemilu yang adil, jujur dan rahasia. Karena kalau menurut saya politik uang identik dengan sogok menyogok yang pastinya akan banyak kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, karena dampak dari pada politik uang sangat luar biasa, contohnya ketika kandidat yang menang memberikan uang sebesar Rp 500.000.000, otomatis kandidat yang menang tadi akan mencari kembali modalnya. Biasanya anggaran turun terhadap masyarakat akan masuk diuang kantug, apalagi kandidat yang kalah, otomatis banyak kerugian yang di rasakannya”.⁶⁰

Jadi, menurut Tajuddin dalam bentuk apapun politik uang, atau dalam bingkai apapun pemahaman tentang politik uang sangat tidak diperbolehkan karena melanggar hukum Islam dan melanggar UU negara.

⁶⁰Tajuddin, tokoh masyarakat sekaligus pendamping/penasehat KPPS pilkades 2014, wawancara langsung pada 27 Desember 2014, pukul 9:30 WIB.

Namun, pandangan berbeda ketika disampaikan oleh kepala Desa Poreh pada saat ditanya tentang pemahamannya tentang politik uang.

“menurut saya, politik uang ada dua unsur, *pertama*, politik uang yang tidak diperbolehkan. Yakni pemberi tidak ikhlas dalam memberikan, mengandung unsur paksaan dalam memberikan uang pada saat pemilu yakni dengan mengharap imbalan dari penerima untuk mendukung atau memilih seseorang yang memberinya. *Kedua*, politik uang yang diperbolehkan. Yakni si pemberi ikhlas dan rela dalam memberikan uangnya tanpa melakukan pemaksaan terhadap si-penerima”.⁶¹

Dengan demikian ada dua pernyataan yang berbeda terkait pemahaman masyarakat tentang politik uang, yakni ada yang mengharamkan politik uang, baik dari segi bingkai pemahaman apapun, atau dari segi unsur apapun. Namun ada yang memperbolehkan politik uang asalkan si-pemberi ikhlas dalam memberikan politik uangnya. Dalam tanda kutip tidak ada paksaan dalam memberi untuk melakukan sesuatu. Pemahaman masyarakat tentang politik uang bervariasi, ada yang memahami sebagai sedekah dari kandidat terhadap masyarakat seperti pemahaman Hendriyadi bahwasanya.

“saya memahami politik uang itu sedekah, yakni pemberian dari kandidat terhadap masyarakat berupa uang sehingga masyarakat merasa itu sebagai pengganti dari pada gaji satu hari, kalau seumpama masyarakat tidak diberikan uang pada saat pemilu pasti masyarakat akan banyak yang golput”.⁶²

Jadi, menurut Hendriyadi politik uang dipahami sebagai sedekah dimana masyarakat menganggap sedekah dalam pemilihan umum itu

⁶¹ Haji Parki Praseno, kepala Desa Poreh, wawancara langsung pada saat 26 Desember 2014, pukul 13:15 WIB.

⁶²Hendriyadi, kepala keluarga, wawancara langsung pada 23 Desember 2014 pukul 9:25 WIB.

merupakan pengganti dari pada gaji selama satu hari. Kalau seumpama masyarakat tidak diberikan uang pada saat pemilu maka masyarakat kebanyakan akan golput. Ada juga pemahaman masyarakat tentang politik uang sebagai alat pemenangan bagi kalangan kandidat, karena merupakan keharusan untuk kandidat memenangkan pemilihan umumnya melalui uang.

“untuk sekarang ini, politik uang sudah lumrah dalam pemilihan umum. Karena sebaik dan sepintar apapun kandidat mau menjadi pejabat pemerintahan kalau tanpa uang maka tidak akan pernah jadi pejabat pemerintahan, begitupun sebaliknya sebodoh apapun kandidat kalau memberikan uang terhadap masyarakat untuk memilihnya maka dia pasti akan menang. Karena uang sekarang sudah menjadikan alat yang strategis bagi kandidat untuk mencapai tujuannya yakni menjadi pejabat pemerintahan”.⁶³

Dengan demikian menurut Abduh, selaku kepala keluarga, tanpa uang kandidat tidak akan pernah mencapai tujuannya yakni menjadi pejabat pemerintahan. Sedangkan menurut penulis itu merupakan pernyataan yang salah, karena kalau uang selalu dijadikan alat yang strategis dalam memenangkan kandidatnya, maka politik uang akan terus berlanjut, sehingga kerugian yang besar akan dirasakan oleh rakyat Indonesia umumnya, rakyat Desa Poreh khususnya.

2. Praktek politik uang di Desa Poreh tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Poreh, keseluruhan beragama Islam. Walaupun demikian, yang menjadi permasalahan adalah

⁶³Abduh, kepala keluarga, wawancara langsung pada 12 Desember 2014 pukul 21:00 WIB.

kenapa masyarakat Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep mengambil politik uang pada saat pilkades ? terbukti pernyataan kepala Desa Poreh ketika ditanya tentang bagaimana praktek politik uang di Desa Poreh.

“kalau berbicara politik uang dek, bukan hanya di Desa Poreh, juga bukan hanya pada saat pilkades, di Desa yang lainnya, pada saat pemilihan yang lainnya (pilbup. pilgub (pemilukada) pileg bahkan pilpres) secara mayoritas terlibat dalam politik uang. Dan itupun masyarakat bukan hanya menerima, melainkan memang mengharap dek”.⁶⁴

Secara implisit kepala Desa Poreh mengakui terkait adanya politik uang pada saat pilkades. Namun, secara eksplisit kepala Desa Poreh menyinggung kebanyakan di Desa manapun, dalam pemilihan apapun (pilbup, pilgub (pemilukada) pileg bahkan pilpres) pasti terlibat politik uang. Yang menarik adalah, ternyata masyarakat bukan menerima, melainkan mengharap pemberian politik uang. Ada masyarakat juga mengungkap bahwasanya :

“untuk pemberian uang pada saat pra sebelum pilkades, dari tim pemenangan kandidat yang bersimbol pisang memberikan uang sebesar Rp 50.000, sedangkan pada saat hari H tim pemenangan tersebut memberikan uang sebesar Rp 30.000. Sedangkan dari tim pemenangan kandidat yang bersimbol padi memberikan uang sebesar Rp 30.000 pada saat satu minggu sebelum pemilihan mas”.⁶⁵

⁶⁴Haji Parki Praseno, kepala Desa Poreh, wawancara langsung pada 26 Desember 2014, pukul 14:40 WIB.

⁶⁵Hendriyadi, kepala keluarga Desa Poreh, wawancara langsung pada 13 Desember 2014, pukul 21:15 WIB.

Secara garis besar praktik politik uang yang terjadi di Desa Poreh ada dua tahap, yakni : *pertama* tahap pra pemilihan, *kedua*, tahap hari H pemilihan. Sangat kurang wajar disaat masyarakat yang cenderung agamis masih menerima politik uang. Menurut peneliti sangat tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam karena identik dengan sogok menyogok yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Walaupun demikian kita tidak boleh menjustifikasi masyarakat yang menurut kita salah. Namun, kita harus menelusuri problem tersebut melalui pemahaman masyarakat Poreh tentang politik uang, sekaligus menelusuri faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pada tahun 2014

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang adalah tidak terlepas dari pada kondisi ekonomi, kondisi perubahan pemahaman dari politik uang berlabel sogok menyogok menjadi politik uang berlabel talikasih. Kondisi keagamaan yakni kurang pahamiannya masyarakat tentang agama, walaupun dari segi keagamaan masyarakat Poreh cenderung agamis. Untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang ditemukan terkait terjadinya politik uang di Desa Poreh adalah sebagai berikut :

a. Kondisi ekonomi

Masyarakat Desa Poreh cenderung menengah kebawah karena masyarakatnya masih kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani,

sehingga kondisi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam menerima uang dalam pemilihan umum. Sebagaimana dikatakan oleh kepala Desa Poreh yakni sebagai berikut:

“sudah saya katakan, bahwasanya masyarakat Poreh dari segi kondisi ekonomi cenderung menengah kebawah, karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai buruh tani yakni kalangan buruh yang tidak mempunyai lahan ataupun sawah untuk bercocok tanam. Sehingga kandidat merasa iba ketika melihat rakyatnya. Dengan demikian disetiap ada pilkades, kami memberikan uang kepadanya dengan ikhlas agar masyarakat bisa membelikan jajan terhadap anak-anaknya”.⁶⁶

Jadi, kondisi ekonomi masyarakat akan dapat melatarbelakangi terhadap pemahaman sekaligus prakter politik uang dalam pilkades 2014 di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

b. Kondisi perubahan pemahaman masyarakat terhadap politik uang

Kondisi perubahan pemahaman masyarakat terhadap politik uang merupakan bentuk perubahan pemahaman masyarakat yang biasanya cenderung masyarakat mengidentikan dengan sogok menyogok. Namun, masyarakat lebih cenderung memperbolehkan terhadap politik uang dalam bingkai tali-kasih. Sebagaimana dikatakan oleh KH Montaha Ridwan selaku tim penasehat pemenang kandidat bersimbol pisang adalah sebagai berikut :

“tolong ini jangan diartikan sogok-menyogok, karena pemberian uang ini merupakan tali-kasih. Dimana masyarakat yang menerima uang ini harus memilih kandidat yang

⁶⁶Haji Parki Praseno, kepala Desa Poreh wawancara langsung pada 26 Desember 2014, pukul 14:55 WIB.

bersimbol pisang. Siapapun orang yang menerima uang ini lantas tidak memilih kandidat yang bersimbol pisang, maka orang tersebut termasuk orang munafik sedangkan ciri-ciri orang munafik menurut Nabi Muhammad SAW adalah “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat” (HR Bukhari). Jadi, anda sekalian yang berkumpul dan menerima uang ini sudah dipercaya untuk mencoblos kandidat yang bersimbol pisang, karena anda sekalian sudah diikat dengan uang ini”.⁶⁷

Perubahan pemahaman seperti ini sangat melatarbelakangi terhadap kalangan masyarakat yang menerima politik uang. Dengan demikian sudilah kiranya kita menjauhi pemahaman tersebut agar tidak menerima politik uang. Ada juga yang merubah politik uang terhadap sedekah politik, ini juga dapat memberikan latarbelakang yang luar biasa terhadap penerima politik uang.

“kalau saya menganggap politik uang itu merupakan sedekah politik, karena niat kandidat itu sangat baik yakni memberikan sedekah berupa uang, masa’ kita mau menolak, kan tidak baik kalau tidak menerima pemberian dari orang lain”.⁶⁸

c. Kondisi keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Poreh memang agamis, dalam arti patuh terhadap agama umumnya, patuh terhadap kalangan tokoh masyarakat, sehingga apapun keputusan tokoh masyarakat kalau sudah masuk akal dan menguntungkan masyarakat, maka masyarakat menerimanya seperti perubahan pemahaman politik uang terhadap tali-

⁶⁷KH Montaha Ridwan, kepala sekolah MI Miftahol Hidayah sekaligus tim penasehat pemenangan kandidat bersimbol pisang, disampaikan pada saat kampanye satu minggu sebelum pemilihan kepala Desa yakni 19 November 2014, pukul 18:30 WIB.

⁶⁸Sya’ir, kepala keluarga, sekaligus tim sukses dari pada kandidat bersimbol padi Desa Poreh, wawancara langsung pada 21 Desember 2014, pukul 18:35 WIB.

kasih, terhadap sedekah politik masyarakat menerimanya. Namun, kekurangannya adalah masyarakat masih kurang paham terkait doktrin agama Islam, sehingga mudah terikut pemahamannya. Sebagaimana dikatakan oleh Hj Rusdi bahwasanya.

“masyarakat Poreh, merupakan masyarakat bunglon, jadi bisa berubah kapan saja asalkan yang mengucapkan kalangan tokoh masyarakat dan tidak merugikan terhadap masyarakat. Karena masyarakat Poreh cenderung kurang begitu paham terhadap ajaran agama Islam sehingga mudah ikut-ikutan tidak mempunyai pendirian sekaligus kepribadian”.⁶⁹

Dengan demikian faktor minimnya pendidikan keagamaan dapat juga melatarbelakangi praktek politik uang dalam pemilihan kepala Desa tahun 2014 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

4. Politik uang dalam perspektif hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya politik uang identik dengan sogok menyogok, karena masyarakat yang disogok dengan uang oleh kandidat menginginkan untuk memilihnya, tidak mungkin kandidat memberikan tanpa mengharap apapun dari yang disogok yakni masyarakat selaku pemilih. sebagaimana dikatakan oleh Tajuddin bahwasanya:

“politik uang itu sama dengan sogok-menyogok. Karena kandidat yang menyogok masyarakat dengan uang berharap untuk memilih kandidat. Sedangkan dalam Islam sudah jelas bahwasanya “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan (HR Turmudzi). Mereka menambahkan : dan orang yang menjadi perantara dalam sogok menyogok. Jadi dalam Islam

⁶⁹Hj Rusdi kepala keluarga, wawancara langsung pada 28 Desember 2014 pukul 16:30 WIB.

sangat melaknat orang-orang yang melakukan sogok menyogok untuk sebuah kedzaliman”⁷⁰.

Dengan demikian sogok menyogok merupakan perbuatan keji yang patut kita tinggalkan, karena kalau tidak kita termasuk orang yang dzalim sehingga kita akan dilaknat oleh Allah SWT.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya peneliti menemukan fenomena sosial yang sangat fatal terkait tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi. Peeliti menemukan realitas di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang tidak sesuai dengan aturan Islam ataupun kontra terhadap regulasi negara yakni kejadian amoral praktek politik uang pada saat pilkades bahkan politik uang dijadikan sebuah alat untuk memenangkan kandidatnya oleh masyarakat Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Padahal di Desa Poreh merupakan Desa yang keseluruhan beragama Islam dan Desa yang agamis.

Masyarakat Poreh ternyata teguh terhadap pendiriannya bahwa kandidat yang memberikan uang pada saat pra pemilu itu merupakan pemberian yang secara cuma-cuma dalam arti diniatkan sebagai sedekah. Jadi harus diterimanya karena tidak baik menolak pemberian dari orang lain. Oleh karena itu, masyarakat Desa Poreh disetiap ada pemilihan umum, masyarakat selalu mengharap dan menerima uang yang diberikan oleh kandidat.

⁷⁰Tajuddin, tokoh masyarakat sekaligus pendamping/penasehat KPPS pilkades 2014, wawancara langsung pada 27 Desember 2014 pukul 10:15 WIB.

Dengan demikian, pemahaman sekaligus praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poreh tidak sesuai dengan doktrin Islam, karena dalam doktrin Islam masyarakat harus meninggalkan segala macam perbuatan keji termasuk politik uang, yakni sogok menyogok. Orang yang menerima sogok menyogoknya termasuk orang yang dzalim dan dikenakan adzab oleh Allah SWT. Sedangkan dalam Undang Undang No. 3 Pasal 73 ayat 3 tahun 1999 siapapun yang memberi dan siapapun yang menerima pemberian suap baik berupa uang, barang dan janji maka dia akan dipidana maksimal 3 tahun.

1. Pemahaman masyarakat tentang politik uang pada saat pemilihan kepala Desa 2014 di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Dari hasil penelitian yang sudah penulis aktualisasikan, ternyata masyarakat Desa Poreh memahami politik uang sebagai pemberian rezeki dari Allah SWT melalui kandidat yang memberikan sedekahnya terhadap masyarakat secara ikhlas. Sehingga masyarakat harus menerimanya, karena kalau tidak menerimanya maka tidak baik menolak sedekah atau pemberian dari orang lain.

Politik uang dalam pengertiannya adalah pemberian uang, janji dan barang dari kandidat atau tim pemenangan kandidat terhadap masyarakat, agar masyarakat memilihnya. Sedangkan dalam Undang Undang No. 3 Pasal 73 ayat 3 tahun 1999 berbunyi:

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.⁷¹

Dalam Islam, politik uang identik dengan sogok menyogok sedangkan sogok menyogok sangat tidak diperbolehkan oleh agama Islam sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya pemahaman kalangan tokoh masyarakat salah kaprah, salah dalam memahami politik uang. Sehingga masyarakat banyak yang menerimanya, oleh karena itu kesalahan paham tersebut haruslah diluruskan agar supaya masyarakat Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep takut dan tidak menerima politik uang lagi.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2014

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ada tiga faktor mengapa terjadi politik uang yakni sebagai berikut :

Pertama. Kondisi ekonomi, ternyata masyarakat di Desa Poreh secara ekonomi menengah kebawah dapat dibuktikan bahwasanya dari segi profesi masyarakat Poreh kebanyakan buruh tani. Buruh yang tidak

⁷¹ Ali Mahfud, *Money politics dalam Pilkada*. Hal 227.

mempunyai lahan ataupun sawah untuk bercocok tanam. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadikan lahan yang subur untuk memudahkan masyarakat Poreh menerima sekaligus mengharap pemberian dari kandidat pada saat pemilihan umum.

Kedua. Kondisi perubahan pemahaman tentang politik uang, perubahan pemahaman ini diaktualisasikan oleh kalangan tokoh masyarakat. Sehingga politik uang biasanya dipahami sebagai sogok menyogok dan tidak diperbolehkan oleh agama dan negara, berubah menjadi tali-kasih yang mengharuskan masyarakat yang menerima uang dari tim pemenangan kandidat untuk memilihny. Pemahaman selanjutnya juga diberikan oleh salah satu tim sukses bahwasanya kandidat yang memberikan uang pada saat pemilihan umum haruslah diterima karena itu merupakan rezeki yang tidak boleh ditolak. Alasannya kandidat ikhlas dalam memberikan uang dan barang. Apalagi kandidat memang sengaja dalam bersedekah, jadi harus diterimanya. Tidak baik menolak pemberian orang yang mau bersedekah.

Ketiga. Kondisi keagamaan, dalam hal ini, masyarakat masih kurang memahami terhadap doktrin ajaran Islam. Sehingga masyarakat Poreh yang agamis, mudah ikut-ikutan dalam menerima politik uang, karena bagi masyarakat itu sesuai dengan ajaran Islam, padahal kalau dikaji lebih dalam lagi politik uang sangatlah kontra dengan doktrin Islam, karena dalam Islam, politik uang identik dengan sogok-menyogok yang dibenci sekaligus dilaknat oleh Allah SWT.

3. Solusi terhadap pemahaman & praktek politik uang di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Solusi terkait pemahaman & praktek politik uang pada saat pilkades tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemilihan umum, badan pengawas pemilu (BAWASLU) harus ditingkatkan. Dalam arti pengawasan pemilihan umum harus senantiasa digalakkan. Agar dapat menghentikan politik uang yang akan datang, karena kelemahan pemerintah dalam melaksanakan wewenang adalah terletak pada control dari pemerintahan itu sendiri. Sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan ataupun kecurangan yang terjadi dilapangan.

Dalam kasus korupsi (penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, kelompok dan orang lain dengan merugikan barang dan uang milik negara) KPK harus senantiasa dimaksimalkan kinerjanya, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan datang. Sedangkan dalam urusan birorasi/keuangan milik negara, badan pemeriksa keuangan (BPK) juga harus senantiasa dimaksimalkan kinerjanya, agar dapat menghentikan KKN yang akan datang.

2. Harus menghilangkan berbagai bingkai pemahaman akan politik uang seperti sedekah politik ataupun tali-kasih yang memperbolehkan pemberian uang dari kandidat atau TSnya dalam pemilihan umum.

3. Harus senantiasa meningkatkan sosialisasi politik (pendidikan politik), agar masyarakat mengerti dan paham betul terkait konstitusi sekaligus prosedur pemerintahan yang ada. Sehingga masyarakat Desa Poreh dengan sendirinya akan mencapai budaya politik partisipan, yang selalu memberikan input (tuntutan, masukan) sekaligus juga ikut andil dalam mempengaruhi kebijakan dan selalu ikut serta mengcontrol kinerja pemerintahan guna mencapai good and clean governance.

D. Analisis Data

Konstruksi pemahaman masyarakat tentang politik uang adalah kalangan tokoh masyarakat. Otomatis masyarakat akan terpengaruh oleh konstruksi pemahaman tentang politik uang. Sehingga masyarakat ikut-ikutan dalam memahami politik uang. Relevan dengan pernyataan Max Weber bahwasanya dalam mengkonstruksi realitas dia menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat sebagai individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial dimana individu menjadi bagian di dalamnya.

Dengan demikian dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang di kenal dengan pendekatan *verstehen* (usaha untuk memahami) agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.

Tahap teori konstruksionis eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, pencurahan atau ekspresi pemikiran masyarakat tentang politik uang bermacam-macam yakni sedekah politik, sogok menyogok dan tali kasih, sehingga pemikiran masyarakat tentang politik uang dapat mengkonstruksi pemahaman sekaligus tindakan masyarakat.

Tahap teori konstruksionis Objektivasi, merupakan hasil yang telah di capai, baik mental maupun fisik dari kegiatan manusia eksternalisasi tersebut. Kalangan tokoh masyarakat, yang menginginkan politik uang dipahami sebagai tali kasih, sangat melatarbelakangi terhadap pemahaman masyarakat, dapat dibuktikan dengan adanya pilkades yang menginginkan banyak pendukung, melalui perubahan pemahaman tersebut akhirnya mendapatkan dukungan yang sangat banyak. Dengan demikian kandidat yang bersimbol pisang akhirnya menang.

Tahap teori konstruksionis Internalisasi, merupakan penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Penyerapan yang dilakukan oleh masyarakat terkait politik uang pada saat pilkades di Desa poreh memberikan pemahaman yang luar biasa terhadap masyarakat, karena yang memahami politik uang sebagai sedekah politik di sunnahkan menerima uang dari kandidat, sedangkan di pahami sebagai tali kasih masyarakat mengharap dan menerima pemberian uang pada saat pilkades. Di pahami sebagai sogok menyogok, masyarakat antipasti terhadap uang pada saat pilkades.

Pemikiran masyarakat tentang politik uang dapat mewarnai terhadap kancah perpolitikan. Sehingga masing-masing kalangan tokoh masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda tentang politik uang. Ada yang memperbolehkan dalam bingkai sedekah politik bahkan ada yang mengharuskan uang yang diberikan oleh kandidat harus diterimanya, karena mengandung tali-kasih, ada juga yang mengharamkannya karena identik dengan sogok menyogok.

Relevan dengan pernyataan Iva Rahmawati bahwasanya dalam bentuk pemikiran yang menjunjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap konstruksi baru secara terus menerus. Dengan demikian konstruktivisme melihat realitas bercorak plural dan realitas itu sendiri berada di pikiran masing-masing. Sesuai dengan pernyataan Berger berkenaan dengan setiap manusia mempunyai konstruksi pemahaman yang berbeda-beda dalam melihat realitas sosial yakni sebagai berikut :

“realitas itu tidak di bentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang di turunkan tuhan. Tetapi sebaliknya, ia di bentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda {plural}. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas”.⁷²

Pemahaman masyarakat di Desa Poreh tentang politik uang sangat bervariasi, sehingga untuk mencari sintesisnya adalah kembali terhadap pernyataannya ketua BAWASLU Jawa Timur bahwasanya “dalam bentuk bingkai apapun politik uang, baik sedekah politik, ongkos politik tapi pelaksanaannya pada saat pra pemilihan umum maka tetap tidak

⁷²Tim Redaksi Driyakara, *Diskursus Kemasyarat Dan Kemanusiaan* hlm. 227.

diperbolehkan karena melanggar terhadap UU”.⁷³ Dalam teori konstruktivis realitas diyakini berada dalam pikiran pengamat maka interaksi subyektif menjadi satu-satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut.

Pemahaman yang disampaikan oleh tim penasehat pemenangan dari pada kandidat yang bersimbol pisang dan padi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, karena masing-masing penasehat memberikan konstruksi yang berbeda terkait politik uang ada yang memberikan konstruksi pemahaman sedekah politik dan ada yang memberikan pemahaman tali kasih, disampaikannya pada saat kampanye ataupun pra pemberian uang acara berlangsung.

Dalam pandangan Konstruktivisme untuk mencapai sintesa pasti melalui dialektika konsensus, dengan tujuan untuk membangun paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.

Teori perilaku memilih merupakan reaksi dari pada rangsangan lingkungan sekitar yang dilakukan untuk mengambil sesuatu yang sesuai dengan kesukaannya. Sedangkan dalam pemilihan umum teori perilaku memilih merupakan tanggapan seseorang untuk mengalokasikan hak pilihnya sesuai dengan kesukaannya. Berdasarkan hasil penelitian ternyata ada dua sub

⁷³Sufyanto, ketua Bawaslu Jawa Timur, disampaikan pada saat mengisi praktikum Gerakan sejuta pengawas pemilu yang diselenggarakan oleh Prodi Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN SA SURABAYA 2014.

yang menjadikan rangsangan dari lingkungan sekitar dalam mengalokasikan hak pilihnya.

Pertama, politik uang mempunyai peranan yang strategis dalam memenangkan kandidat, bahkan politik uang juga dapat menjadikan motivasi untuk perilaku memilih dalam memilih kandidat yang membagikan uang terhadap pemilih.

Kedua, kalangan tokoh masyarakat, kalangan tokoh masyarakat seperti kiai, ustadz juga mempunyai peranan strategis untuk memenangkan kandidat, terbukti ketika tim penasehat dari pemenang kandidat yang bersimbol pisang terkenal dengan julukan kiai terjun ke lapangan demi mencari pendukung kandidatnya. Setelah itu merubah pemahaman dari politik uang yang dikenal dengan sogok-menyogok, menjadi pemberian uang tali-kasih, siapapun yang menerima uang tersebut harus memilih kandidatnya, karena orang yang menerima tersebut termasuk orang yang munafik. Sehingga efek dari pada konstruksi pemahaman dari kiai tersebut dapat melatarbelakangi ribuan orang untuk sepaham dengannya. Otomatis masyarakat banyak yang memilih kandidatnya.

Tipologi perilaku memilih masyarakat ada empat, *pertama*, perilaku memilih rasional, *kedua* perilaku memilih kritis, *ketiga*, perilaku memilih tradisional dan *keempat* perilaku memilih yang skeptis, diantara perilaku memilih yang dijelaskan tersebut diatas idealnya menginginkan perilaku

memilih yang rasional dan perilaku memilih kritis, karena perilaku memilih yang rasional akan mampu berfikir untuk melihat rekam jejak kandidat.

Dengan demikian, ketika kandidat yang dipilih itu jadi, perilaku memilih yang rasional mendapatkan apa yang diinginkan, intinya perilaku memilih yang rasional melakukan sesuatu harus bisa mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya masyarakat Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep secara mayoritas identik dengan perilaku memilih skeptis dalam arti hak suara pemilih masih bisa ditukar dengan uang, barang ataupun janji.